

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban
Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane
Kabupaten Asahan)

¹Melia Syahfitri, ²Arnida Wahyuni Lubis, ³Muhammad Arif

¹Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan, meliasafitri153@gmail.com

²Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan, arnidawahyuni@yahoo.com

³Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan, muhammadarif@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author: meliasafitri153@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application of accounting procedures for East Sei Silau Village in presenting village financial statements, to determine the application of SAP No. 01 in East Sei Silau Village, to determine the quality of management of East Sei Silau Village financial accountability reports and to determine the application of accountability and transparency systems in East Sei Silau Village financial accountability. The type of research used is qualitative. The subjects of this study were the Village Head, Secretary and Treasurer of East Sei Silau Village. The data obtained are primary data and skunder data. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation and literature studies. The results showed that first, the application or financial accounting of East Sei Silau Village was carried out quite well, as evidenced from the forms and data owned were complete, but in the presentation of the report on the realization of the implementation of the APBDes experienced a deficit. Both presentations of the East Sei Silau Village Financial Statements are in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 and based on PSAP No.01 but the presentation has not been timely. Third, to present quality financial statements, financial presentation using a competterization system, but there are constraints regarding the limited ability of managers in their fields and inadequate supporting tools. The four principles of accountability in Sei Silau Timur Village are implemented with physical and administrative accountability. The village government also provides information boards regarding the APBDes as proof of transparency.

Keywords: *Application of Government Accounting Standards, Village Financial Accountability.*

Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan satu kesatuan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pemberian hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber

informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang penting, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah yang akuntabel ialah pemerintah yang mampu memberikan informasi mengenai pemerintahannya secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. Sedangkan transparansi yaitu keterbukaan, sehingga asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan desa. Desa merupakan urutan paling akhir pada sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusi sebuah desa menduduki posisi yang sangat penting. Akuntabilitas pada pemerintah desa menyertakan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah.

Pemerintah juga wajib untuk menyampaikan segala informasi secara transparan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui besar pendapatan dan pengeluaran sebuah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu aparat desa yang berkedudukan sebagai bendahara desa peneliti mendapatkan sebuah informasi bahwa laporan keuangan desa tersebut tidak sepenuhnya disajikan secara transparan. Bendahara desa menyatakan dalam wawancara tersebut bahwa “Desa menerapkan prinsip transparansi hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja, pihak-pihak tersebut adalah inspektorat beserta kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa”.

Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. Peneliti menemukan fenomena yang dianggap menarik untuk diteliti dimana hasil akhir yang disajikan pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes selalu mengalami defisit setiap tahunnya dan untuk penyajian laporan keuangannya Desa Sei Silau Timur belum bisa menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)”.

Landasan Teori

Akuntansi Pemerintahan

Definisi akuntansi secara umum adalah suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Menurut penafsiran Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial. Dalam

ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adilmerata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*).

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

SAP merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, sehingga akuntabilitas dapat tercapai. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Transparansi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan reformasi dalam bidang Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa sangatlah penting. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kebijakan Keuangan Desa

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Pengelolaan dana desa merupakan tugas penting bagi pemerintah desa. Dikarenakan pengelolaan keuangan merupakan salah satu inti dari penyelenggaraan pemerintahan. Seringkali kita mendengar akan istilah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari

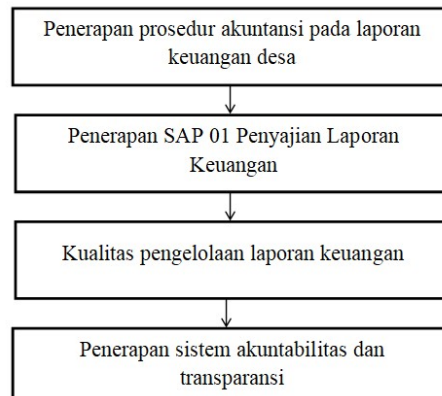
APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, di mana pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan di dalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sedangkan pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan dimana diharapkan terciptanya suatu keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Baik dalam pemerintah, perusahaan dan perorangan yang mana pelaku ekonomi ini harus bertanggungjawab kepada stakeholdernya, yang mana informasi akuntansi yang mereka terima akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran



Gambar I. Kerangka Pemikiran

Penerapan prosedur akuntansi pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa harus sesuai dengan anggaran pemerintah. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintahan yang meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang disusun secara sistematis dalam satu periode. Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa disusun berdasarkan Standar Akuntansi (SAP) No. 01 tentang penyajian Laporan Keuangan. Kualitas pengelolaan laporan keuangan Desa dapat diukur dari kinerja atau kemampuan sumber daya yang dimiliki. Penerapan sistem akuntabilitas sangat penting untuk menghindari adanya penyelewengan dana akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Sei Silau Timur, kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Peneliti membutuhkan waktu selama 5 bulan tercatat mulai bulan September 2022 sampai Januari 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bendahara Desa Sei Silau Timur selaku pengurus yang membuat pembukuan dan laporan keuangan, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Objek penelitian adalah pencatatan dan laporan keuangan desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu data yang tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Bila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer (*primary data*) dan data skunder (*secondary data*).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan dilakukan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif yang membahas mengenai masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun sehingga dapat memberikan informasi terhadap masalah yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prosedur Akuntansi Desa Sei Silau Timur dalam Menyajikan Laporan Keuangan Desa

Hasil temuan penelitian tentang penerapan akuntansi Desa Sei Silau Timur dalam menyajikan laporan keuangan desa berdasarkan hasil dari Kepala Desa pada tanggal 23 September 2022 yang menyatakan:

“Semua laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan prosedur dan penerapannya berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa untuk mencatat setiap pengeluaran maupun pemasukan setiap bulannya dan mengkonfirmasi kepada Sekretaris Desa kemudian akan dilaporkan kepada saya selaku Kepala Desa”.

Untuk penerapan prosedur akuntansi dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa, Desa Sei Silau Timur sudah melaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut terbukti dari formulir dan data yang dimiliki Desa Sei Silau Timur sudah lengkap. Formulir dan data ini yang akan digunakan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa Sei Silau Timur juga telah menerapkan akuntansi sesuai dengan SAPDesa yang terdapat dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6 tentang penyusunan Pengelolaan Keuangan di desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 pada Desa Sei Silau Timur

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai PSAP No. 01 pada Desa Sei Silau Timur terhadap salah satu subjek penelitian yaitu :

“Kami membuat laporan keuangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Banyak laporan yang telah kami buat diantaranya Laporan Realisasi APBDesa, laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan, laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan dan masih banyak lagi laporan lainnya”.

Untuk penyajian laporan keuangannya Desa Sei Silau Timur belum bisa menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya kapasitas administrasi dan tata kelola yang dimiliki oleh pemerintah desa. Terutama pada pejabat pelaksana pengelola keuangan desa yang dituntut untuk membuat laporan keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pada bidang akuntansi.

Kualitas Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sei Silau Timur

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa Sei Silau Timur telah menerapkan sistem komputerisasi untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa yaitu:

“Saat ini pemerintah desa telah menggunakan aplikasi atau Siskeudes dalam pengelolaan keuangan yang sangat membantu pihak desa dalam menyusun laporan keuangan secara efektif dan efisien. Kurangnya kualitas sdm yang dimiliki juga berdampak pada kualitas laporan yang akan dihasilkan. Desa saat ini masih kekurangan perangkat pendukung seperti komputer solusi sementara mengatasi masalah itu menggunakan laptop milik pribadi perangkat desa.”

Hasil analisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diperoleh dengan teori yang ada dimana sumber daya manusia yang dimiliki Desa Sei Silau Timur untuk menjalankan sistem akuntansi kurang memiliki keahlian, dan pengalaman di bidangnya, yang kemungkinan besar akan menimbulkan hambatan di dalam kegiatan serta pelaksanaan yang mencakup fungsi akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah. Ketidaksesuaian juga terjadi di Desa Sei Silau Timur mengenai masalah ketepatanwaktu dalam pelaporan keuangan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi atau sebagai indikator yang penting dalam laporan keuangan supaya dapat dikatakan berkualitas, peran dari pemanfaatan teknologi informasi bagi sektor pemerintahan yaitu digunakan untuk meningkatkan ketepatanwaktu laporan keuangan pemerintah desa namun untuk teknologi serta komputer Desa Sei Silau Timur masih kekurangan perangkat.

Penerapan Sistem Akuntabilitas dan Transparansi pada Pertanggung-jawaban Keuangan Desa Sei Silau Timur

Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Sei Silau Timur sudah dapat dikatakan baik. Adanya transparansi memberikan akses atau kebebasan bagi siapapun untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, walaupun warga belum mengerti jelas tentang isi laporan realisasi yang tercantum tetapi warga sudah sedikit memahami mengenai pengeluaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk membangun desa. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Desa Sei Silau Timur melibatkan masyarakat desa sebagai bukti dari adanya transparansi. Pemerintah Desa juga menyediakan papan informasi mengenai APBDes.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini :

1. Penerapan akuntansi dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan desa, Desa Sei Silau Timur sudah melaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) yang terdapat dalam Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6. Tetapi Pemerintah Desa Sei Silau Timur dalam penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami defisit.
2. Penyajian Laporan Keuangan Desa Sei Silau Timur telah disusun dan disajikan sesuai persyaratan kelengkapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan berdasarkan PSAP No.01. Namun untuk Neraca ada beberapa bagian yang tidak ada disajikan yaitu investasi jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Hal ini terjadi karena unsur tersebut memang tidak ada di Pemerintah Desa Sei Silau Timur. Penyajian laporan keuangannya belum tepat waktu karena masih minimnya kapasitas administrasi dan tata kelola yang dimiliki oleh pemerintah desa.
3. Untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas Pemerintah Desa Sei Silau Timur menggunakan sistem komputerisasi dengan Aplikasi Siskeudes namun terdapat kendala dalam penerapannya yaitu keterbatasan kemampuan pengelola di bidangnya dan masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Pemerintah Desa Sei Silau Timur serta kurangnya perangkat pendukung yang dimiliki oleh desa.
4. Prinsip akuntabilitas di Desa Sei Silau Timur sudah terlaksana dengan adanya pertanggungjawaban secara fisik maupun administrasi. Masyarakat juga sudah merasakan manfaat atas pembangunan dan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai bukti dari adanya transparansi. Pemerintah Desa juga menyediakan papan informasi mengenai APBDes.

Daftar Pustaka

- Albugis, F. F. (2016). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 78–89.
- Alfurkaniati, Safrida, L., Nasirwan, Harmain, H., Nurlaila, Lande, A., Limaryani, S.,

- Sejati, F. R., Muthmainnah, Ernawati, Y., & Safrita. (2017). *Pengantar Akuntansi 1*. Madenatera.
- Anggraeni, U. S., & Taufiqur Rohman. (2021). Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 33–66.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember*. 2(3), 473–485.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. UMSIDA PRESS.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Dia Mubaroka, Ask, N. S., & Junaidi. (2017). *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa (Studi Kasus Di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Jawa Timur)*. 6, 91–112.
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hanifah, S. I. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. 4(8).
- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Kencana.
- Harahap, R. D., & Marliyah. (2021). *Akuntansi Syari'ah*. FEBI UIN-SU Press.
- Hariatih, & Sukardi. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal PenKomi*, 4(1), 47–59.
- Ikhsan, A., Albra, W., Aziza, N., Khaddafi, M., Hayat, A., Oktaviani, A., & Lesmana, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Madenatera.
- Ikyarti, T., & Aprilia, N. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma*. 9(2), 131–140.
- Jatmiko, B., Prawoto, N., Astuti, R. J., Sari, R. N., & Ardhi, K. F. (2019). Application of Government Accounting Standards , Financial Statements Reporting , and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). *Atlantis Press*, 102(Icaf), 6–12.
- Jaya, I. M. L. M. (2014). Accounting Treatment In Village Public Sector. *Gorontalo Accounting Journal*, 113, 1–10.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset*, 4.
- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah*. MADENATERA.
- Lubis, A. W. (2020). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. FEBI UINSU Medan.
- Lubis, S. M. Y. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*. 1.
- Mulyanto, Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

- Sebagai Variab. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), 1–17.
- Noho, M., & Ali, Y. (2021). Penerapan PSAP No.01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Di Desa Pentadio Timur. *Jurnal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.24-30.2021>
- Noviyanto, E. M. dan H. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (Studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 171–183.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara.
- Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5).
- Runtuuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 168–175.
- Shuida, N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UUD No.6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. 12(2), 671–680.
- Tiyas, B. A., & Pravitasari, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*. 02(02), 63–74.
- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Warsi, D. A. S., & Handayani, K. (2019). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Studi Pada Pemerintah Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten*. 2(1), 27–38.
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. CV.Noah Aletheia.
- Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2017). *Akuntansi Pengantar I*. Gadjah Mada University Press.